

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Relasi Kuasa

Konsep kekuasaan menurut Michel Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Mudji Sutrisno,2005:146). Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan disini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.

Foucault memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal(Nanang Martono:81). Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil(Mudji Sutrisno,2005:150). Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa di lokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum

siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Keinginan untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Dari pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai terhadap manusia lainnya.

Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi objek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak yang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan (Roderick Martin, 1995:98)

Saling ketergantungan diakibatkan karena adanya kerawanan. Maksud dari kerawanan yakni ketidakseimbangan keadaan kelimpahan sumber-sumber, misalnya pertentangan antara masyarakat kelas bawah dan kelompok penguasa yang mempunyai kelimpahan sumber-sumber tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya sumber-sumber yang dimiliki baik itu secara materiil atau sumber-sumber alam yang menjadikan pola ketergantungan (Roderick Martin, 1995:102)

2. Pengertian Reklamasi

Menurut Hasni istilah reklamasi merupakan turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”. Di dalam teknik pembangunan, istilah *reclaim* juga dipergunakan di dalam misalkan *me-reclaim* bahan dari bekas bangunan atau dan puing-puing, seperti batu dan kerikil dan bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi (Rahmat Audy, 2014).

Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah *reclaim* atau reklamasi juga dipakai di dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna (Rahmat Audy, 2014).

Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung dari sasaran yang ingin dicapai. Di dalam pembangunan penghunian dan perkotaan adakalanya daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan. Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan. (Rahmat Audy, 2014).

Pengertian reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan atau usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai atau di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air) (Rahmat Audy,2014).

Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ,reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

3. Tujuan Reklamasi

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi

mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.
(<https://www.kompasiana.com/>)

Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu(<https://www.kompasiana.com/>)

Kegiatan reklamasi ini dilakukan oleh suatu otoritas (negara, kota besar, pengelola kawasan) yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan atau ketersediaan ruang dan lahan untuk mendukung laju pertumbuhan yang ada, sehingga diperlukan untuk mengembangkan suatu wilayah daratan baru

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan menjelaskan hasil bacaan atau referensi yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Dan pokok masalah yang akan diteliti mempunyai hubungan dengan sejumlah teori yang telah ada (Muljono: 2013).

Penelitian pertama yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Eva Royandi Ricardus Keiya dengan judul Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta Eva Royandi, Ricardus Keiya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasi kuasa dan teori elit. Hasil kajian ini mendapati bahwa kehadiran reklamasi ini berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Muara Angke, yang kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya seperti pedagang dan pengelola hasil laut.

Table 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Perbedaaan	Persamaan	Hasil Penelitian
Eva Royandi, Ricardus Keiya. 2018, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta.	Menggunakan teori elit. Menggunakan pendekatan studi pustaka Lebih berfokus kepada sosial-ekonomi masyarakat terutama nelayan.	Sama-sama bertema tentang reklamasi teluk Jakarta. Sama-sama berlokasi di Muara Angke.	Hasil kajian ini mendapati bahwa kehadiran reklamasi ini berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Muara Angke, yang kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya seperti pedagang dan pengelola hasil laut.

C. Kerangka Pemikiran

Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan, sebagaimana yang terjadi saat ini di pesisir teluk Jakarta. Proses reklamasi pantai pada kenyataannya belum bisa berjalan dengan baik. *Public good policy* yang dipilih dari permasalahan diatas adalah kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi reklamasi pantai di Pesisir Teluk Jakarta.

Reklamasi Teluk Jakarta merupakan konsep lama dan panjang dari beberapa Gubernur di Jakarta. Dalam prosesnya selalu menuai kontroversi dan pro-kontra antara elemen masyarakat dan pemerintah yang tak kunjung usai. Pemerintah dan masyarakat tetap saling beranggapan bahwa pilihan mereka lah yang terbaik untuk Jakarta kedepannya. Kedua sisi ini terus saling bersitegang, ditambah dengan dikeluarkan dan disahkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk melegalkan proses pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta.

Maka dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana relasi kuasa yang terjadi dalam proses Reklamasi Teluk Jakarta.

Gambar 2.1
Skema Pemikiran



